# Suap Mengakar di Tender

Tribun Pontianak
SABTU
5 MARET 2011

## Pengadaan Barang dan Jasa

Lelang tender proyek dari pemerintah rawan dikorupsi. Terbukti, sekitar 89 persen penyedia barang dan jasa pengusaha rekanan pemerintah melakukan suap dalam usaha memenangkan tender.

Kenyataan ini terungkap dalam hasil survei Indonesia Procurement Watch (IPW) di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada September-November 2010. "92 persen penyedia barang dan jasa atau pengusaha rekanan pemerintah pernah melakukan penyuapan dalam tender. Dari angka itu, sekitar 89 persen melakukan suap untuk memenangkan tender tersebut," kata Program Director IPW, Hayie Muhammad, usai memberikan data survei ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (4/3).

Dalam proses tender, ide pemberian suap banyak berasal dari pejabat atau panitia pengadaan. Karena itu, kecil kemungkinan bila penyedia konstruksi, konsultan, penyedia barang dan jasa pemerintah bisa memenangkan tender tanpa melakukan suap. "Sekitar 72 persen inisiatif pemberi suap itu berasal dari aparat pemerintah. Dan mereka akui kalau sulit mendapat tender tanpa penyuapan," ujarnya.

Survei itu melibatkan 792 responden yang berasal dari perusahaan penyedia barang dan jasa instansi pemerintah. Responden tersebar di lima wilayah kota Jabodetabek. Pengumpulan data dilakukan sejak September hingga November 2010.

Survei juga hal yang sangat mengejutkan. Sebanyak 52,9 persen responden mengatakan, praktik suap untuk mendapatkan dan memenangkan tender sudah dilakukan sejak pertama kali perusahaannya berdiri.

> "Artinya, secara keseluruhan kita menganggap bahwa seluruh instansi dan departemen pemerintah itu ada mafia tender."
>
> **HAYIE MUHAMMAD**
> Program Director IPW

Hayie menuturkan, ada fenomena di mana sebuah perusahaan hanya bercokol di satu instansi pemerintah saja untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Dan selalu mendapatkan kontrak selama puluhan tahun.

Kemampuan menjadi rekanan yang demikian lama diyakini responden, karena perusahaan tersebut rajin memberikan suap dan 'pembinaan'. "Jadi kami mengindikasikan di sini bahwa itu adalah bentuk mafia tender yang ada di Indonesia. Jadi mereka cenderung tidak ikut tender di instansi lain karena sudah mempunyai jalur pengaturan di instansi tersebut," paparnya.

Proses pengadaan barang dan jasa yang di antara dilakukan mulai dari persiapan, perencanaan pengadaaan hingga penyerahan pekerjaan barang dan jasa. Hasil survei menyebutkan, sebanyak 69,3 persen responden melakukan suap sebelum proses tender dimulai. "Hal itu menguatkan keyakinan publik selama ini bahwa perilaku suap untuk memenangkan tender sudah terjadi sejak perencanaan suatu proyek," imbuhnya.

IPW menilai, hampir seluruh instansi pemerintah terdapat mafia tender atau calo tender. Hal ini dikuatkan dari temuan IPW, sebanyak 15 persen proses tender diatur oleh mafia tender. "Artinya, secara keseluruhan kita menganggap bahwa seluruh instansi dan departemen pemerintah itu ada mafia tender," katanya.

Hasil lainnya dari survei itu adalah 92,7 persen responden menyatakan pernah memberikan suap kepada penyelenggara negara terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Sedangkan 1,3 persen menyatakan tidak pernah dan 6,0 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Atas temuannya itu, dia berharap, KPK segera melakukan tindakan berupa pengawasan langsung proses pengadaan. Seperti penyusunan dokumen lelang, evaluasi, pengumuman pemenang. Tapi hanya terbatas pada proyek-proyek yang besar tentunya.

Karena menurutnya, KPK terbatas pada sumber dayanya. "Jadi (nilai tender) yang sekitar Rp 30 miliar atau Rp 40 miliar ke atas yang bisa dikawal KPK atau BPK. KPK sendiri mengapresiasi hasil survei kami dan mereka akan menindak lanjuti itu tentu dengan tindakan yang sesuai kewenangan mereka. Masalah suap dalam pengadaan barang dan jasa adalah hal berat, jadi perlu strategi khusus untuk pemberantasan korupsinya," papar Hayie.

**(tic/viv/kompas.com)**

### Hasil Survei

**Mayoritas Menyuap**
- 92,7 persen pernah memberikan suap
- 1,3 persen tidak pernah menyuap
- 69,3 persen responden melakukan suap sebelum proses tender dimulai.
- 52,9 persen responden mengatakan praktik suap sudah dilakukan sejak pertama kali perusahaan berdiri.

**Tujuan Suap**
- 89,7 persen untuk memenangkan proses tender.
- 4,3 persen sebagai hadiah
- 3,9 persen untuk ucapan terima kasih
- 2,1 persen tidak tahu

**Inisiatif Suap**
- 72,3 persen dari aparat dan pejabat
- 15,7 persen mafia tender
- 8,7 persen perusahaan

**Responden**
Survei IPW dilakukan pada 792 responden dengan lokasi di Jabodetabek

**Bidang Usaha**
- Barang: 40 Persen
- Konstruksi: 25 Persen
- Konsultan: 25 Persen
- Jasa lainnya: 10 Persen

**Metode**
- Survei dilakukan dengan telepon, mendatangi langsung, dan melalui situs IPW pada 10 September 2010-30 November 2010.

SUMBER: IPW